

KOMUNIKASI POLITIK DALAM REFORMASI PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR: SEBUAH TINJAUAN LITERATUR

Muhammad Alam Zumiraj¹, Haikal Gifari², Harmonis³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Jakarta

1alamzumiraj46@gmail.com, 2hakialgifari27@gmail.com, 3harmonis@umj.ac.id

ABSTRACT

Educational reform is a crucial agenda in the effort to improve human resources quality in Indonesia. Political communication plays a central role in this process, particularly in the context of elementary education. This study employs a qualitative method with a literature review design to analyze relevant literature on political communication in the elementary education reform in Indonesia. The results indicate that effective political communication is essential for disseminating educational policies, garnering support, and overcoming resistance from various stakeholders. The main challenges include a lack of clarity in conveying information, low community participation, and insufficient feedback mechanisms. Successful communication strategies include the use of mass media and social media, participatory approaches, and training for stakeholders. Best practices from countries like Finland and Singapore highlight the importance of transparency and community participation in the educational reform process. Based on these findings, it is recommended that the government enhance the transparency and consistency of communication, encourage active community participation, develop effective feedback mechanisms, adopt international best practices, and improve stakeholders' communication skills. Thus, it is hoped that political communication in elementary education reform in Indonesia can be more effective and achieve the desired educational goals.

Keywords: *educational reform, elementary school, political communication*

ABSTRAK

Reformasi pendidikan merupakan agenda penting dalam rangka ihtiar guna mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Komunikasi politik memainkan peran sentral dalam proses ini, terutama dalam konteks pendidikan jenjang dasar. Metode kualitatif digunakan pada penelitian dengan desain studi pustaka untuk menganalisis literatur yang relevan mengenai komunikasi politik dalam reformasi pendidikan sekolah dasar di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi politik yang efektif sangat penting untuk mensosialisasikan kebijakan pendidikan, menggalang dukungan, dan mengatasi resistensi dari berbagai pemangku kepentingan. Tantangan utama yang dihadapi meliputi kurangnya kejelasan dalam penyampaian informasi,

rendahnya partisipasi masyarakat, dan kurangnya mekanisme umpan balik yang efektif. Strategi komunikasi yang berhasil termasuk penggunaan media massa dan media sosial, pendekatan partisipatif, serta pelatihan bagi para pemangku kepentingan. Praktik terbaik dari negara lain seperti Finlandia dan Singapura menunjukkan pentingnya keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam proses reformasi pendidikan. Berdasarkan temuan ini, disarankan agar pemerintah meningkatkan transparansi dan konsistensi komunikasi, mendorong partisipasi aktif masyarakat, mengembangkan mekanisme umpan balik yang efektif, mengadopsi praktik terbaik internasional, dan meningkatkan keterampilan komunikasi para pemangku kepentingan. Dengan demikian, diharapkan komunikasi politik dalam reformasi pendidikan sekolah dasar di Indonesia dapat lebih efektif dan berhasil mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang diharapkan.

Kata Kunci: reformasi pendidikan, sekolah dasar, komunikasi politik

A. Pendahuluan

Reformasi pendidikan telah menjadi salah satu agenda utama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di berbagai negara (Azizaturrosyidah, Amali, & Ahsan, 2023). Di Indonesia, reformasi pendidikan pada tingkat sekolah dasar (SD) tidak hanya melibatkan aspek pedagogis dan kurikulum, tetapi juga menyangkut kebijakan dan komunikasi politik yang mengiringi pelaksanaannya (Rahmat & Husain, 2020). Komunikasi politik memegang peranan penting dalam proses reformasi karena menyangkut cara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat berinteraksi memengaruhi satu sama lain dalam menentukan arah dan kebijakan pendidikan (Suryana, Haekal, Islami,

& Ashari, 2024). Artikel ini bertujuan untuk meninjau literatur yang ada mengenai komunikasi politik dalam konteks reformasi pendidikan sekolah dasar di Indonesia. Dengan memahami bagaimana komunikasi politik berperan dalam proses reformasi ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika yang terjadi dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

Reformasi pendidikan di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan tantangan sejak beberapa dekade terakhir. Meski upaya-upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan, hasil yang diharapkan seringkali belum tercapai sepenuhnya (Siregar, 2021). Salah satu komponen yang

berkontribusi adalah pada saat terjadinya komunikasi politik yang kurang efektif antara pemerintah, pemangku kepentingan pendidikan, dan masyarakat (Ariyani & Nugraheni, 2024).

Komunikasi politik mencakup bagaimana kebijakan pendidikan dikomunikasikan kepada publik, bagaimana aspirasi dan feedback dari masyarakat diakomodasi dalam proses pembuatan kebijakan, serta bagaimana transparansi dan akuntabilitas dijaga oleh pemerintah (Roihanah, Setiawan, Setianto, & Istinganah, 2022). Dalam konteks reformasi pendidikan SD, berbagai masalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat, resistensi dari para guru dan pihak sekolah, serta kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat seringkali muncul akibat komunikasi politik yang kurang optimal.

Literatur menunjukkan bahwa komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam implementasi kebijakan pendidikan yang sukses (Nani, 2021; Suciana, Dayat, & Gumilar, 2022). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana komunikasi politik saat ini dilakukan

dalam proses reformasi pendidikan SD di Indonesia, apa saja kendala yang dihadapi, serta bagaimana praktik terbaik dari negara lain dapat diadaptasi.

Melalui tinjauan literatur pada tulisan, kedepannya besar harapan mampu memunculkan gambaran jelas terkait peran komunikasi politik dalam reformasi pendidikan sekolah dasar di Indonesia, serta memberikan rekomendasi yang dapat di implementasikan untuk memperbaiki proses komunikasi tersebut demi mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian studi pustaka (literature review). Penelitian ini berfokus pada analisis berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk jurnal akademik, buku, laporan kebijakan, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan komunikasi politik dalam reformasi pendidikan sekolah dasar di Indonesia. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendalami dan memahami secara mendalam fenomena komunikasi

politik dalam konteks reformasi pendidikan, serta untuk menggali berbagai perspektif yang muncul dari literatur yang ada (Creswell, 2016).

Proses penelitian dimulai dengan pencarian literatur menggunakan kata kunci yang relevan, seperti “komunikasi politik”, “reformasi pendidikan”, dan “sekolah dasar”. Sumber-sumber literatur yang ditemukan kemudian dievaluasi berdasarkan relevansi dan kualitasnya. Literatur yang terpilih dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola komunikasi, serta tantangan dan keberhasilan yang terkait dengan komunikasi politik dalam konteks reformasi pendidikan SD.

Data yang dikumpulkan dari literatur dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis), di mana peneliti mengidentifikasi dan mengkategorikan informasi yang ditemukan sesuai dengan tema penelitian (Zuchdi & Afifah, 2021). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyusun gambaran yang komprehensif tentang bagaimana komunikasi politik memengaruhi proses reformasi pendidikan, serta mengidentifikasi

praktik terbaik dan rekomendasi yang dapat diterapkan di Indonesia.

Dengan menggunakan metode studi pustaka, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis yang mendalam, tetapi juga menawarkan perspektif praktis yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan pendidikan dalam meningkatkan efektivitas komunikasi politik dalam proses reformasi pendidikan sekolah dasar.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini mengungkap beberapa temuan utama mengenai komunikasi politik dalam reformasi pendidikan sekolah dasar di Indonesia, yang diperoleh melalui analisis literatur yang komprehensif. Berikut adalah hasil-hasil penelitian yang telah diidentifikasi:

1. Peran Komunikasi Politik dalam Reformasi Pendidikan

Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi politik memiliki peran sentral dalam proses reformasi pendidikan. Komunikasi politik memegang peranan penting karena dapat membentuk citra serta opini publik agar menjadi lebih positif (Alfiyani, 2018). Citra serta opini

publik yang lebih positif akhirnya membudayakan pemerintah dalam mensosialisasikan kebikalan baru.

Pemerintah menggunakan komunikasi politik untuk mensosialisasikan kebijakan baru, menggalang dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, dan mengatasi resistensi dari pihak-pihak yang terlibat, seperti guru dan orang tua siswa (Sururi, Hafidh, & Afifah, 2023). Kebijakan pendidikan yang disampaikan dengan jelas dan transparan cenderung mendapatkan dukungan yang lebih luas dan implementasi yang lebih lancar.

Komunikasi politik yang dilakukan pemerintah dalam dunia pendidikan juga berperan penting dalam menyampaikan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan di Indonesia, dimana pendidikan kita harus segera maju karna kualitas pendidikan kita sudah jauh tertinggal (Anggraini, Yulianti, Nurfaizah, & Pandiangan, 2022; Priatmoko, 2018; Rahman & Akbar, 2021). Kualitas pendidikan menurut isikawa, dalam tulisannya yang dimuat oleh alifah : (a) Excellent customer service are synonymous, meaning they refer to the same thing. (b) Quality is a comprehensive notion that

encompasses not just product quality, but also the quality of individuals, procedures, and all other facets of the business. Maksudnya kualitas mempunyai dua dimensi: (a) kualitas dan kepuasan pelanggan adalah satu hal yang sama, karena ketika pelanggan menerima barang atau jasa yang berkualitas maka mereka akan memperoleh kepuasan. (a) Kualitas adalah konsep luas yang mencakup tidak hanya kualitas produk, tetapi juga kualitas orang, proses kerja, dan setiap aspek organisasi (Alifah, 2021).

Teori Komunikasi Politik, khususnya teori Agenda Setting, dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana komunikasi politik memengaruhi pembentukan agenda kebijakan pendidikan (Putranto, 2024). Dengan menggunakan agenda setting, pemerintah dapat memprioritaskan isu-isu tertentu dalam komunikasi mereka kepada masyarakat, sehingga mengarahkan perhatian publik pada aspek-aspek tertentu dari reformasi pendidikan. Selain itu, teori komunikasi politik yang berfokus pada konsep kepercayaan dan legitimasi juga dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana komunikasi politik dapat

membangun kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan pendidikan yang diusulkan (Yusuf, 2023).

2. Tantangan dalam Komunikasi Politik

Beberapa tantangan utama dalam komunikasi politik terkait reformasi pendidikan di Indonesia disebabkan karna kondisi masyarakat Indoneisa yang beragam , dimana perbedaan latar belakang, budaya dan adat masih menjadi tantangan pemerataan pendidikan Indonesia (Huda, Maftuh, & William, 2023; Ridho, Wardhana, Yuliana, Qolby, & Zalwana, 2022). Perbedaan cara berkomunikasi serta penerimaan komunikasi di Indonesia masih menjadikan kejelasan dalam penyampaian kebijakan pendidikan di Indonesia terhambat (Amri, Bird, Ronan, Haynes, & Towers, 2017; Riana, ZUHAIRI, & Maria, 2006).

Komunikasi dan penerimaan yang berbeda di setiap daerah menyebabkan terjadinya kesalah pahaman dan perbedaan dalam penerapan sehingga menyebabkan kerancuan dalam pendidikan di Indonesia, kerancuan tersebut meliputi kurangnya kejelasan dan

konsistensi dalam penyampaian kebijakan, rendahnya partisipasi masyarakat, dan kurangnya mekanisme feedback yang efektif (Yuliah, 2020). Literatur menunjukkan bahwa sering kali, kebijakan pendidikan yang disampaikan tidak dipahami dengan baik oleh para guru dan orang tua, yang mengakibatkan resistensi dan ketidakpatuhan. Selain itu, komunikasi satu arah dari pemerintah ke masyarakat tanpa adanya mekanisme umpan balik yang memadai juga menghambat proses reformasi.

Teori Komunikasi Organisasi dan Teori Penerimaan Informasi (Information Processing Theory) dapat digunakan untuk memahami tantangan-tantangan yang dihadapi dalam komunikasi politik (Mukarom, 2020). Misalnya, teori penerimaan informasi dapat menjelaskan mengapa pesan kebijakan pendidikan tidak dipahami dengan baik oleh masyarakat karena adanya hambatan dalam proses pengolahan informasi. Sementara itu, teori komunikasi organisasi dapat membantu mengidentifikasi faktor internal dan eksternal organisasi pendidikan yang dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi politik (Suherman, 2020).

3. Strategi Komunikasi yang Efektif

Studi literatur mengidentifikasi beberapa strategi komunikasi yang terbukti efektif dalam mendukung reformasi pendidikan (Gouédard, Pont, Hyttinen, & Huang, 2020; Purkey & Smith, 1985). Salah satu strategi adalah penggunaan media massa dan media sosial untuk menyebarkan informasi secara luas dan cepat (Ambarwati, Wibowo, Arsyiadanti, & Susanti, 2021). Pendekatan partisipatif, di mana masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan, juga menunjukkan hasil yang positif. Selain itu, pelatihan dan workshop untuk guru dan staf sekolah tentang kebijakan membantu mengurangi resistensi dan meningkatkan pemahaman serta dukungan terhadap reformasi (Efendi & Sholeh, 2023). Teori mengenai Komunikasi Pembangunan (Development Communication) dapat memberikan kerangka kerja untuk merancang strategi komunikasi yang efektif dalam mendukung reformasi pendidikan (Kustiawan, Syahdafi, Fadhli, Pangestu, & Ramadhani, 2023). Konsep partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan

pemberdayaan melalui media massa dan media sosial sesuai dengan prinsip komunikasi pembangunan. Selain itu, teori Komunikasi Interpersonal dapat digunakan untuk memahami pentingnya interaksi personal dalam menyampaikan informasi dan membangun hubungan yang kuat antara pemerintah dan masyarakat (Hsb & Yusniah, 2024).

4. Praktik Terbaik dari Negara Lain

Beberapa praktik terbaik dari negara lain yang dapat diadaptasi di Indonesia termasuk pelibatan komunitas proses pengambilan keputusan pendidikan, penggunaan platform digital untuk komunikasi dengan *feedback* atau dua arah antara pemerintah yang berperan sebagai komunikator dengan masyarakat sebagai penerima, dan peningkatan transparansi melalui publikasi laporan berkala tentang perkembangan reformasi pendidikan (Nasir, Mahmudinata, Ulya, & Firdaus, 2023). Negara seperti Finlandia dan Singapura menunjukkan komunikasi yang baik terjalin erat antara pemerintah dengan masyarakat dari berbagai kalangan, keterbukaan proses reformasi, menghasilkan sistem pendidikan yang lebih efektif dan efisien (Fitria, 2024).

Teori Transfer Teknologi dan Adaptasi dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana praktik-praktik terbaik dari negara lain dapat diadaptasi dan diterapkan dalam konteks Indonesia. Konsep transfer teknologi menyatakan bahwa pengalaman dan pengetahuan dari satu konteks dapat diadopsi dan dimodifikasi untuk diterapkan dalam konteks lain (Kriyantono, 2017).

Dengan mempertimbangkan perbedaan konteks budaya, politik, dan sosial, praktik-praktik terbaik dari negara-negara seperti Finlandia dan Singapura dapat disesuaikan agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan unik Indonesia. Salah satu aspek penting dalam pendidikan yang harus mampu dikelola oleh Indonesia adalah sosial media, dimana sosial media sangat berpengaruh bagi kehidupan siswa di Indonesia. Teknologi terus-menerus diciptakan, baik setiap hari, setiap jam, atau bahkan setiap detik. Perkembangan media saat ini sesuai dan menuju dengan munculnya media baru, yang sering disebut sebagai media masa depan. (Hadi, 2009; Indrawan & Ilmar, 2020; Pratyaksa & Putri, 2020). Seperti yang terlihat dari pesatnya pertumbuhan komputer, internet,

telepon, ponsel pintar, dan tablet, media baru memiliki definisi yang cukup luas. Kecepatan dunia pendidikan dalam mengantisipasi, menyerap dan memanfaatkan media sosial baru dirasa masih sangat kurang (Alfiyani, 2018; Livingstone, 2002; Van Aelst & Walgrave, 2004). Banyak hal yang berubah akibat evolusi teknologi ini, termasuk kebiasaan, gaya hidup, dan bahkan metode komunikasi. Perubahan pasti mempunyai dampak baik dan buruk. (Setiawan, 2018).

Kebiasaan komunikasi mulai berubah drastis akibat maraknya media sosial. Sebelumnya, premis inti komunikasi media adalah bahwa komunikator sering kali adalah media massa, kelompok besar, atau organisasi, dan komunikan adalah orang-orang yang hanya menerima dan memberikan komentar atau umpan balik yang tertunda. Gagasan itu telah berubah secara signifikan. Saat ini, setiap orang dapat menjadi komunikator untuk khalayak luas. Seorang komunikan juga dapat menjadi komunikator apabila ia mampu mengartikulasikan, mendorong, atau menyebarkan gagasan orang lain.

5. Rekomendasi untuk Peningkatan Komunikasi Politik

Berdasarkan temuan di atas, peneliti mencoba merekomendasikan beberapa langkah untuk meningkatkan komunikasi politik dalam reformasi pendidikan sekolah dasar di Indonesia. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan kejelasan dan konsistensi dalam penyampaian kebijakan. Kedua, mekanisme umpan balik yang efektif dikembangkan untuk memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan dipertimbangkan. Ketiga, pelibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan harus ditingkatkan untuk menciptakan rasa memiliki dan dukungan yang lebih besar terhadap kebijakan pendidikan. Terakhir, penggunaan teknologi digital harus dimaksimalkan untuk meningkatkan transparansi dan akses informasi. Memaksimalkan penggunaan teknologi digital juga akan menambah kemudahan bagi guru, orang tua serta dinas terkait untuk melakukan pemantauan terhadap proses belajar siswa. Pemantauan selama proses belajar ini menjadi penting guna menanamkan sikap sikap jujur, disiplin dan tanggung jawab yang sangat diperlukan siswa

semasa dewasa. Mental yang terbentuk sebagai bangsa Indonesia dan kebanggaan bangsa Indonesia harus ditanamkan sejak dini.

Hasil penelitian menunjukkan bagaimana komunikasi politik diterapkan dengan cara yang efektif adalah kunci keberhasilan reformasi pendidikan. Dengan memperhatikan temuan dan rekomendasi ini, diharapkan reformasi pendidikan sekolah dasar di Indonesia dapat berjalan lebih lancar dan mencapai tujuan yang diinginkan.

D. Kesimpulan

Studi ini menggambarkan pentingnya komunikasi politik dalam konteks reformasi pendidikan sekolah dasar di Indonesia. Melalui analisis literatur, telah diungkapkan bahwa komunikasi politik memegang peranan kunci dalam membentuk agenda kebijakan, guna membangun dan memperoleh suara dukungan masyarakat, dan memfasilitasi implementasi kebijakan pendidikan. Namun, berbagai tantangan kurang kejelasan dalam penyampaian informasi, kurangnya partisipasi masyarakat, dan hambatan dalam proses umpan balik masih menjadi masalah utama yang perlu diatasi.

Dalam memperbaiki komunikasi politik dalam konteks reformasi pendidikan, beberapa strategi efektif telah diidentifikasi, termasuk penggunaan media massa dan media sosial, pendekatan partisipatif, dan pelatihan untuk para pemangku kepentingan. Selain itu, ada banyak pelajaran yang dapat dipetik dari praktik terbaik negara lain seperti Finlandia dan Singapura, yang menunjukkan bahwa komunikasi politik yang baik dapat membawa dampak positif pada sistem pendidikan.

Untuk meningkatkan komunikasi politik dalam reformasi pendidikan sekolah dasar di Indonesia, beberapa langkah perlu dipertimbangkan. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan konsistensi dalam penyampaian informasi kebijakan pendidikan kepada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui publikasi yang jelas dan terperinci tentang kebijakan pendidikan, serta memastikan bahwa pesan yang disampaikan konsisten dan dapat dipahami oleh semua pihak. Selanjutnya, upaya harus dilakukan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan

pendidikan, baik melalui konsultasi publik, forum diskusi, atau mekanisme partisipasi lainnya. Diperlukan juga pengembangan mekanisme umpan balik yang efektif untuk memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, pemerintah dapat mengadopsi contoh pola komunikasi politik yang baik, negara lain yang telah lebih rapih dalam menjalin hubungan lewat komunikasi politik dalam konteks pendidikan, dan menyesuaikannya dengan kondisi lokal. Terakhir, pelatihan dan pendidikan tentang komunikasi politik perlu diberikan kepada para pemangku kepentingan, termasuk guru, staf sekolah, dan pejabat pemerintah, untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam berkomunikasi secara efektif. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan komunikasi politik dalam reformasi pendidikan sekolah dasar di Indonesia dapat menjadi lebih efektif, sehingga tujuan-tujuan pendidikan yang lebih baik dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiyani, N. (2018). Media Sosial Sebagai Strategi Komunikasi Politik. *Potret Pemikiran*, 22(1).
- Alifah, S. (2021). Peningkatan Kualitas Pendidikan di Indonesia untuk Mengejar Ketertinggalan dari Negara Lain. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 5(1), 113–123.
- Ambarwati, D., Wibowo, U. B., Arsyadanti, H., & Susanti, S. (2021). Studi literatur: Peran inovasi pendidikan pada pembelajaran berbasis teknologi digital. *Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan*, 8(2), 173–184.
- Amri, A., Bird, D. K., Ronan, K., Haynes, K., & Towers, B. (2017). Disaster risk reduction education in Indonesia: Challenges and recommendations for scaling up. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 17(4), 595–612.
- Anggraini, D. L., Yulianti, M., Nurfaizah, S., & Pandiangan, A. P. B. (2022). Peran guru dalam mengembangkan kurikulum merdeka. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 1(3), 290–298.
- Ariyani, D., & Nugraheni, N. (2024). Menuju Pendidikan Berkualitas: Kontribusi Indonesia dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)*, 1(3), 198–205.
- Azizaturrosyidah, U., Amali, M. F., & Ahsan, M. (2023). Penerapan Manajemen Guru Berbasis Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 9(1), 431–446.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Efendi, N., & Sholeh, M. I. (2023). Manajemen pendidikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran. *Academicus: Journal of Teaching and Learning*, 2(2), 68–85.
- Fitria, E. (2024). Komparasi Sistem Pendidikan Finlandia dan Singapura: Studi dalam Meningkatkan Reputasi Sistem Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Genesis Indonesia*, 3(01), 34–48.
- Gouëdard, P., Pont, B., Hyttinen, S., & Huang, P. (2020). *Curriculum reform: A literature review to support effective implementation*.
- Hadi, I. P. (2009). Perkembangan teknologi komunikasi dalam era jurnalistik modern. *Scriptura*, 3(1), 69–84.
- Hsb, S. P., & Yusniah. (2024). Analisis Pola Komunikasi Interpersonal Guru dengan Siswa dalam Membentuk Kemandirian Siswa Tunagrahita di Sekolah Luar Biasa (SLB C Karya Tulus). *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi*, 5(2), 1879–1892.
- Huda, M. M., Maftuh, B., & William, N. (2023). Urgensi Pendidikan Multikultural di Sekolah Dasar Sebagai Upaya Pencegahan Konflik Sosial Sejak Dini. *Jurnal Elementaria Edukasia*, 6(2), 1015–1022.

- Indrawan, J., & Ilmar, A. (2020). Kehadiran media baru (new media) dalam proses komunikasi politik. *Medium*, 8(1), 1–17.
- Kriyantono, R. (2017). *Teori-teori public relations perspektif barat & lokal: Aplikasi penelitian & praktik*. Jakarta: Kencana.
- Kustiawan, W., Syahdafi, A., Fadhli, M., Pangestu, S. A., & Ramadhani, Z. (2023). Konsep Informasi Development, Media Development dan Source of Information dalam Komunikasi Pembangunan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 12797–12806.
- Livingstone, S. (2002). Young people and new media: Childhood and the changing media environment. *Young People and New Media*, 1–278.
- Mukarom, Z. (2020). *Teori-teori komunikasi*. Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Diambil dari <https://etheses.uinsgd.ac.id/31495/>
- Nani, Y. N. (2021). Peran Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Perluasan Akses Pendidikan secara Merata (Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo). *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 7(3), 231–240.
- Nasir, M., Mahmudinata, A. A., Ulya, M., & Firdaus, F. A. (2023). Strategi Pemberdayaan Sekolah sebagai Upaya Peningkatan Manajemen Pendidikan. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 1(2), 799–816.
- Pratyaksa, I. G. T., & Putri, N. L. W. E. (2020). Peranan New Media Dalam Transformasi Fungsi Komunikator Dan Fungsi Konstruksi (Dramaturgy Akun Instagram Walikota Denpasar Rai Mantra Tahun 2019). *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2–3), 92–103.
- Priatmoko, S. (2018). Memperkuat Eksistensi pendidikan Islam di era 4.0. *TA'LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 1(2), 221–239.
- Purkey, S. C., & Smith, M. S. (1985). School Reform: The District Policy Implications of the Effective Schools Literature. *The Elementary School Journal*, 85(3), 353–389.
- Putranto, A. (2024). *Komunikasi Politik*. Batam: Cendikia Mulia Mandiri. Diambil dari
- Rahman, D., & Akbar, A. R. (2021). Problematika yang dihadapi lembaga pendidikan Islam sebagai tantangan dalam meningkatkan mutu pendidikan. *Nazzama: Journal of Management Education*, 1(1), 76–89.
- Rahmat, A., & Husain, R. (2020). *Manajemen Berbasis Sekolah Untuk Perbaikan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Riana, K. E., ZUHAIRI, A., & Maria, M. (2006). The decision-making process of distance education students at Universitas Terbuka in Indonesia. *Asian Journal of Distance Education*, 4(1), 20–33.

- Ridho, A., Wardhana, K. E., Yuliana, A. S., Qolby, I. N., & Zalwana, Z. (2022). Implementasi pendidikan multikultural berbasis teknologi dalam menghadapi era society 5.0. *EDUCASIA: Jurnal Pendidikan, Pengajaran, Dan Pembelajaran*, 7(3), 195–213.
- Roihanah, R., Setiawan, F., Setianto, E., & Istinganah, I. (2022). Legitimasi dan Komunikasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Education and Development*, 10(3), 94–99.
- Setiawan, D. (2018). Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap budaya. *JURNAL SIMBOLIKA Research and Learning in Communication Study*, 4(1), 62–72.
- Siregar, E. S. (2021). Dampak Reformasi Pendidikan Indonesia Di Abad 21. *Jurnal Guru Kita*, 5(4).
- Suciana, P., Dayat, U., & Gumilar, G. G. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(7), 318–327.
- Suherman, A. (2020). *Buku Ajar Teori-Teori Komunikasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sururi, M. P., Hafidh, Z., & Afifah, D. A. (2023). *Analisis Kebijakan Sekolah Penggerak: Tinjauan Teoretis dan Model Implementasi Kebijakan Edwards III*. Bandung: Indonesia Emas Group.
- Suryana, C., Haekal, A. H., Islami, A. N., & Ashari, D. (2024). *Politik Inklusif di kehidupan pesantren: Studi naratif Kiyai Muhammad Luthfi Yahya NZ dalam komunikasi politik di era digital*. Gunung Djati Publishing.
- Van Aelst, P., & Walgrave, S. (2004). New media, new movements. *The Role of the Internet in Shaping the 'Anti-globalization' Movement, Cyberprotest*, Routledge, London, 87–108.
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(2), 129–153.
- Yusuf, R. I. (2023). *Komunikasi Politik: Seni dan Teori*. Yogyakarta: Deepublish.
- Zuchdi, D., & Afifah, W. (2021). *Analisis Konten Etnografi & Grounded Theory, dan Hermeneutika Dalam Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.